

# Refungsionalisasi kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia = Recreate ministry of religious affairs as one effort to realizing legal protection for citizens which adherent traditional religion in Indonesia

Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423188&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b>

Tesis ini membahas tentang refungsionalisasi Kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Refungsionalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum administrasi terhadap warga Negara penganut aliran kepercayaan, terutama untuk mengoptimalkan kewenangan pelayanan publik dibidang keagamaan yang diberikan oleh Negara. Hal demikian dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu perubahan Format kementerian agama yang strukturnya tidak dibuat berdasarkan agama mayoritas yang ada di Indonesia, mengembalikan kewenangan pembinaan terhadap aliran kepercayaan yang sebelumnya berada dalam direktorat pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Serta mencabut kewenangan kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, untuk kemudian kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan tersebut dikembalikan kedalam satu kementerian.

### <hr><i><b>ABSTRACT</b></i>

This thesis analysis about Recreate ministry of religious affairs as one effort to realizing legal protection for citizens which adherent traditional religion in Indonesia. Recreate ministry of religious affairs of the Republic of Indonesia is required as part of efforts to realize the protection of administrative law against citizens which adherents traditional religion, especially to optimize the religious authority in the field of public services provided by the State. This can be done through several ways: Format changes the structure of ministry of religious addairs is not made based on the majority religion in Indonesia, restore the authority of coaching against cult which had previously been in Ministry of Education and Culture, Revoke the authority of the prosecutor in conducting surveillance the adherents of traditional religion, for then the authority to conduct training and supervision were merged into a ministry.</i>